**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia adalah kebutuhan pendidikan, seringkali kemiskinan menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan tersebut.

Dikutip dari situs online **(**<http://faktadki.com/>) menyatakan: “Berdasarkan data BPS 2016, terlihat bahwa terjadinya peningkatan angka kemiskinan di DKI Jakarta. Angka kemiskinan di DKI Jakarta memang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 ke tahun 2010, angka kemiskinan mengalami peningkatan sehingga menjadi 388.200 ribu jiwa. Kemudian jumlah penduduk miskin berkurang pada tahun 2011 sehingga menjadi 355.200 jiwa, yang artinya menurun sekitar 33.000 ribu jiwa. Namun pada dua tahun selanjutnya yakni tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Peningkatan jumlah penduduk miskin justru meningkat cukup signifikan pada tahun 2014, hingga berjumlah 412.800 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami peningkatan terus selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2012-2014.” Di bawah ini disajikan jumlah penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta tahun 2009 sampai dengan 2013.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi

Tahun 2009-2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten/Kota Adm** | **Penduduk Miskin (ribu)** | | | | |
| **2009 1)** | **2010 1)** | **2011 2)** | **2012 2)** | **2013 2)** |
| Kepulauan Seribu | 2,4 | 2,7 | 2,47 | 2,6 | 2,5 |
| Jakarta Selatan | 73,7 | 78,4 | 71,84 | 74,1 | 74,6 |
| Jakarta Timur | 81,2 | 91,6 | 83,82 | 86,5 | 86,8 |
| Jakarta Pusat | 32,1 | 35,7 | 32,63 | 33,6 | 33,6 |
| Jakarta Barat | 74,0 | 87,2 | 79,71 | 82,3 | 83,2 |
| Jakarta Utara | 76,2 | 92,6 | 84,73 | 87,2 | 90,9 |
| **DKI Jakarta** | **339,6** | **388,2** | **355,20** | **366,3** | **371,7** |
| Catatan/Note: | 1 ) Keadaan Juli | | | | |
| 2 ) Keadaan September | | | | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari masing-masing Kabupaten/Kota Administrasi selalu mengalami perubahan jumlah tingkat kemiskinan dari tahun 2009 sampai dengan tahunn 2013. Wilayah Jakarta Utara menjadi wilayah yang paling banyak penduduk miskinnya, dan Jakarta Timur menempati posisi kedua.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sudah banyak kebijakan-kebijakan ataupun pogram yang dibuat oleh pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan ini, tidak hanya dari segi ekonominya tetapi dari segi sosial dan pendidikan. Dari segi pendidikan, pemerintah telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan dalam menunjang kebutuhan terkait dengan pendidikan bagi penduduk miskin.

Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Masyarakat miskin berpandangan bahwa masalah perut lebih kruisal dibandingkan dengan pendidikan, oleh karena itu banyak penduduk miskin di seluruh Indonesia yang tidak menamatkan pendidikannya sampai Wajib Belajar 12 tahun seperti yang direncanakan oleh pemerintah. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin berpikir dua kali dalam memberikan pendidikan bagi anggota keluarga mereka.

Kasus kemiskinan yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan seperti yang sudah dijelaskan di atas, tentu saja bertolak belakang dengan anjuran pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berisi tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan, disebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dikutip dari jurnal Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi DKI Jakarta: Peluang Dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan (Anggi Afriansyah 2017: 2) mengemukakan bahwa: “Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan yang berkualitas bagi warganya. Melalui pendidikan, diharapkan tercapai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu, negara wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warganya, karena pendidikan adalah investasi yang paling penting untuk meningkatkan kualitas SDM”.

Kunci untuk mendapatkan generasi cerdas dan produktif adalah memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan gender, status sosial ekonomi, etnisitas, suku bangsa, agama maupun bahasa. Pendidikan harus dinikmati setiap anak bangsa tanpa pengecualian dan diskriminasi. Setiap anak bangsa wajib mendapatkan pendidikan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan salah satu tujuan negara: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai wilayah Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta berusaha semaksimal mungkin memberikan kemudahan dalam mengakses segala kebutuhan pendidikan sehingga masyarakat DKI Jakarta tidak mengalami kesulitan dalam mencapai Wajib Belajar 12 tahun. Pemerintah DKI Jakarta sendiri melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 tahun di tahun 2007.

Upaya tersebut terus berlanjut sehingga dicanangkannya Wajib Belajar 12 tahun DKI Jakarta pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa-siswi miskin di Provinsi DKI Jakarta. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini bertujuan untuk menigkatkan askes memperoleh pendidikan, kepastian layanan pendidikan, dan kualitas hasil pendidikan.

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Program tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No.27 Tahun 2013. Melalui program ini, peserta didik yang tidak mampu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Program KJP dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Adanya KJP diharapkan memberi dampak positif bagi seluruh penerimanya.

Sementara itu, tujuan KJP sebagaimana dikemukakan dalam Pergub Provinsi DKI No. 174 Tahun 2015 Pasal 3 bahwa KJP bertujuan untuk: (i) mendukung terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata; dan (iii) menjamin kepastian mendapat layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan, artinya dalam Pergub yang baru tersebut, asas keadilan dan pemerataan yang lebih ditekankan.

Siswa yang berhak menerima KJP harus memenuhi persyaratan seperti berikut : (1) Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, (2) Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, (3) Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, (4) Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat, (5) Menandatangani lembar Fakta Integritas yang telah disediakan.

Siswa-siswi penerima besiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP) yaitu siswa miskin, siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler.

Para siswa-siswi yang menerima besiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP) memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda, ada yang memiliki motivasi belajar tinggi dan ada juga yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Motivasi bisa bersa dari internal siswa dan juga eksternal siswa, keduanya sangat mempengaruhi motivasi belajar yang dimiliki siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarrnya. Dari pernyataan tersebut maka dapat dilihat jika motivasi dalam belajar menjadi faktor dominan dalam mencapai suatu keberhasilan belajar. Motivasi belajar siswa akan menjadi salah satu faktor pencapaian siswa dalam berprestasi di sekolah.

Motivasi belajar pada siswa miskin yang menerima bantuan besiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan yang dimiliki. Kemiskinan secara signifikan berimbas pada motivasi belajar siswa dan tingkat prestasi akademis siswa, motivasi belajar siswa dan kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan sangat bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Cenderung mereka beranggapan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, dan persoalan mengenai prestasi belajar tidak terlalu dipandang sebagai sesuatu yang penting.

Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi individu adalah konsep diri, apabila seorang individu meyakini dirinya mampu melakukan suatu hal maka individu tersebut akan berusaha keras untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya, begitu juga sebaliknya. Konsep diri seorang remaja dimana pada rentang usia tersebut anak berada pada fase pertumbuhan dan fase pencarian jati diri.

Remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri ini mulai menilai bagaimana diri mereka sendiri, mulai mengembangkan konsep diri yang ada pada diri mereka seiring dengan bertambahnya berbagai pengalaman dan pengetahuan individu. Keyakinan dari dalam individu terhadap dirinya tentu akan membentuk perilaku yang akan ia kerjakan. Hal tersebut berhubungan dengan konsep diri yang terbentuk oleh individu terhadap dirinya yang akan mempengaruhi besar kecilnya motivasi berprestasi pada individu.

Konsep diri ini berkaitan dengan pandangan siswa yang menerima beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP), seringkali konsep diri siswa memiliki arti negatif ketika mereka tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki karena mereka beranggapan bahwa mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Tetapi jika siswa tersebut memiliki penialian yang positif tentang konsep diri mereka maka motivasi belajar dan keinginan untuk berprestasi itu tinggi. Motivasi belajar yang tinggi sehingga mereka dapat mencapai prestasi belajar yang baik maka konsep diri yang dihasilkan pun akan positif.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis merasa tertarik untuk menelaah hal tersebut dalam penelitian dengan judul: “Pengaruh Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat”. Penelitian ini sejalan dengan salah satu topik penelitian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander dalam Soehartono (2011: 15) sebagai berikut: “Studi tentang sejarah lembaga-lembaga amal, perundang-undangan kesejahteraan sosial, program-program kesejahteraan sosial dan konsep-konsep kesejahteraan sosial”.

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMP Negeri 215 Jakarta Barat?
2. Bagaimana motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat?
   1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
      1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang: “Pengaruh Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat” untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat
2. Motivasi belajar siswa yang tidak mendapatkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan siswa yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMP Negeri 215 Jakarta Barat
3. Pengaruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat
   * 1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial serta dibutuhkan manfaat bagi penulis. Maka dari itu, penulisan usulan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, siswa, SMP Negeri 215 Jakarta Barat, siswa yang telah mendapatkan bantuan maupun siswa yang belum mendapatkan bantuan serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat. Kegunaan atau manfat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pemecahan masalah-masalah dan saran kepada siswa, siswa yang mendapat beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, SMP Negeri 215 Jakarta Barat, sehingga mereka dapat memahami hal yang berkaitan dengan pengaruh program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Konsep kesejahteraan sosial merupakan suatu program yang terorganisir dan sistematis. Penelitian dalam kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sosial yang dihadapi, jenis-jenis penelitian pekerjaan sosial yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Dengan berbagai langkah dalam melakukan penelitian tersebut.

Kesejahteraan sosial merupakan disiplin ilmu yang didasarkan pada keterpaduan antara kerangka pengetahuan *(body of knowledge)*, kerangka keterampilan *(body of skills)*, dan kerangka nilai *(body of values)* yang bertujuan membantu indvidu, kelompok masyarakat, dan organisasi sosial dalam mengembangkan segala potensi dan sumber yang ada dalam rangka meningkatkan ksejahteraan sosialnya. Definisi kesejahteraan sosial menurut Midgley dalam Adi (2013: 6) adalah sebagai berikut: “Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan”.

Kesejahteraan merupakan suatu kegiatan yang berpusat pada membantu orang-orang yang mengalami permasalahan sosial, kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan yang terfokus dan berintegrasi dengan permasalahan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Seorang pekerja sosial harus memiliki konsep tersebut dalam melakukan intervensinya, yaitu bertujuan untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat dalam mencapai keberfungsian sosialnya dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penelitian dalam kesejahteraan sosial diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada. Definisi kesejahteraann sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2012: 9) sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan- pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi kesejahteraan sosial tersebut memberikan pengertian bahwa dalam mencapai standar hidup yang memadai perlu dibuat suatu pelayanan sosial yang teroragnisir dari suatu institusi atau lembaga sehingga individu, kelompok ataupun masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan mereka sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri dan kehidupan mereka. Dalam hal ini kemampuan yang dimiliki siswa dapat berkembang dari segi pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan juga motivasi belajar mereka dengan baik karena adanya program beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini. Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto (2010: 1) adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa dalam pemecahan masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas tentang kondisi sosial yang dialami masyarakat. Harus melibatkan peran dari berbagai institusi dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial ini. Pihak-pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ini harus bekerjasama dan berkesinambungan agar terjadi peningkatan kualitas kehidupan individu, kelompok, maupun masyarakat. Definisi usaha-usaha kesejahteraan sosial pada UU No. 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial”.

Usaha kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan membuat suatu program ataupun kegiatan yang bertujuan dalam mewujudkan, membina, memelihara, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Usaha-usaha kesejahteraan tersebut dibuat dalam rangka mencegah, mengurangi, dan menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Definisi usaha kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2012: 15) sebagai berikut :

Sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha- usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.

Usaha kesejahteraan sosial menurut definisi di atas bahwa usaha kesejahteraan sosial memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia dalam suatu bentuk program sosial yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat. Program sosial yang dibentuk ini ditujukan untuk seluruh bidang-bidang kehidupan tanpa terkecuali. Definisi usaha kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 Tahun 2009 yang dikutip Fahrudin (2012: 16) adalah sebagai berikut :

Usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan definisi usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan pengertian tersebut adalah usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terpadu dan terarah serta berkelanjutan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pelayanan sosial yang diberikan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, dan memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (development).

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan usaha kesejahteraan sosial dengan membuat suatu program beasiswa pendidikan bagi siswa miskin di DKI Jakarta. Usaha-usaha kesejahteraan sosial ini dapat tercapai melalui pelayanan sosial yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi pelayanan sosial menurut Suharto (2009: 154) adalah sebagai berikut: “Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat pogram yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Pengertian pelayanan sosial tersebut memberikan pengertian bahwa untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial dan hambatan dalam mengakses pelayanan sosial maka dibuatlah suatu program yang signifikan dengan permasalahan tersebut. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial. Oleh sebab itu maka pelayanan sosial yang diberikan harus mudah diakses oleh seluruh orang yang menerimanya. Definisi pelayanan sosial menurut Huraerah (2011: 45) bahwa: “Pelayanan sosial yaitu kegiatan terorganisasi yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya”.

Pengertian pelayanan sosial menurut Huraerah tersebut bentuk pelayanan yang bersifat holistik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteran. Pelayanan sosial dalam hal ini berarti keluarga miskin yang tidak bisa memberikan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka dapat terpenuhi dengan adanya program beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP). Definisi pelayanan sosial menurut Kahn dalam Fahrudin (2012: 51) adalah sebagai berikut :

Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan akses pelayanan kepada masyarakat, pelayanan ini dapat berupa informasi ataupun program-program yang dibuat demi meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok ataupun masyarakat. Pelayanan sosial yang disediakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dijalankan dapat sesuai. Definisi di atas menyatakan bahwa pelayanan sosial yang dilakukan melalui program beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP). Definisi Kartu Jakarta Pintar menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015 menyatakan: “Kartu Jakarta Pintar adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Personal Pendidikan”.

Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program yang diperuntukkan bagi siswa miskin yang berada di DKI Jakarta. Program ini memberikan biaya operasional pendidikan kepada siswa miskin yang mendapatkan beasiswa Kartu Jakarta Pintar ini. Pelayanan sosial yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bertujuan agar siswa miskin di DKI Jakarta dapat mengikuti program Wajib Belajar 12 tahun serta memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Definisi siswa menurut Desmita (2012: 39) adalah sebagai berikut:

Siswa adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing- masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, siswa memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.

Dari pengertian di atas siswa adalah individu yang sedang dalam proses belajar dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Serta sedang belajar meningkatkan kemampuan melalui proses belajar untuk memperoleh prestasi bidang pendidikan baik itu secara formal maupun non formal. Selain itu juga dapat memiliki konsep diri yang baik karena mereka mendapatkan program beasiswa tersebut. Definisi siswa dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa: “Siswa atau peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang berusaha dalam mengembangkan kemampuan lewat proses pendidikan pada jenjang tertentu”.

Berdasarkan definisi di atas siswa merupakan individu yang merupakan bagian dari masyarakat yang mengembangkan kemampaun yang dimiliki melalui proses pendidikan formal ataupun informal. Melalui proses pendidikan ini siswa dapat mengetahui tentang jati diri nya dan juga memiliki konsep diri serta motivasi untuk belajar. Definisi siswa menurut Abu Achmadi (2003: 148) sebagai berikut: “Siswa atau peserta didik adalah seorang yang belum dapat dikatakan dewasa, ia memerlukan seseorang untuk membimbing dan juga berusaha sendiri untuk perlahan menemukan jati diri dan kedewasaan”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa siswa dalam proses belajar juga berusaha untuk menemukan jati dirinya. Dalam pembentukan motivasi belajar, seorang siswa memerlukan bimbingan dan arahan dari orang yang memang berpengaruh dalam hidupnya seperti orang tua, ataupun dari orang yang dekat dengannya seperti teman sebaya. Definisi motivasi belajar menurut Uno (2016: 23) adalah: “Dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung”.

Indikator motivasi belajar menurut Uno dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (5) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.

Pada siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) rasa ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berprestasi ditunjukkan. Dorongan internal dan eksternal ini erat kaitannya dengan konsep diri yang mereka miliki. Motivasi belajar yang hendak dicapai melalui dorongan yang terjadi pada seseorang untuk mencapai standar kepandaian atau standar keahlian yang mereka miliki.

Siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mampu mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan mencapai standar kepandaian dan keahlian tersebut. Motif yang kuat yang dimiliki oleh siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat membangkitkan motivasi belajar yang mereka miliki. Motif yang kuat tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus berpengaruh positif kepada siswa agar dapat mencapai motivasi belajar nya dengan baik.

* 1. **Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan pada penelitian yang berjudul: “Pengaruh program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat” adalah :

Pernyataan Hipotesis Utama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hipotesis  Null (H0) | : | Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat |
| Hipotesis  Alternatif (H1) | : | Terdapat pengaruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat |

Sedangkan pernyataan Sub Hipotesis sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. H0 | : | Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap kemampuan siswa dalam dorongan internal di SMP Negeri 215 Jakarta Barat |
| H1 | : | Terdapat pengaruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap kemampuan siswa dalam dorongan internal di SMP Negeri 215 Jakarta Barat |
| * + 1. H0 | : | Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap kemampuan siswa dalam dorongan eksternal di SMP Negeri 215 Jakarta Barat |
| H1 | : | Terdapat pengaruh pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap kemampuan siswa dalam dorongan eksternal di SMP Negeri 215 Jakarta Barat |

* 1. **Definisi Operasional**

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disebut KJP adalah Bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari Keluarga Tidak Mampu. (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018)
2. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. (Uno 2016: 23)
   1. **Operasionalisasi Variabel**

Tabel 1.2 Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Item Pernyataan** |
| Variabel x :  Program beasiswa Kartu Jakarta Pintar  (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013) | 1. Wajib Belajar 12 Tahun 2. Kebutuhan pendidikan | 1. Akses pendidikan mudah 2. Akses pelayanan sekolah 3. Terpenuhi perlengkapan sekolah 4. Terpenuhi peralatan sekolah | 1. Kemudahan mendapatkan pembelajaran di sekolah 2. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya 3. Kemudahan mengakses perpustakaan 4. Kemudahan mengakses laboratorium 5. Penggunaan dana KJP untuk membeli seragam sekolah 6. Penggunaan dana KJP untuk membeli sepatu sekolah 7. Penggunaan dana KJP untuk membeli tas sekolah 8. Penggunaan dana KJP untuk membeli alat tulis sekolah 9. Penggunaan dana KJP untuk membeli buku sekolah |
| Variabel y :  Motivasi belajar  (Uno, 2016) | 1. Dorongan Internal 2. Dorongan Eksternal | 1. Kemauan dalam diri 2. Adanya keinginan untuk berhasil 3. Adanya harapan dan cita-cita 4. Pemikiran yang positif 5. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 6. Orang tua 7. Teman sebaya 8. Adanya penghargaan dalam belajar 9. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 10. Adanya lingkungan belajar yang kondusif | 1. Datang ke sekolah tepat waktu 2. Berdiskusi dengan teman tentang mata pelajaran 3. Bertanya pada guru tentang mata pelajaran 4. Belajar dengan sungguh-sungguh 5. Mengerjakan tugas-tugas sekolah 6. Mengerjakan tugas kelompok dengan baik 7. Membaca kembali materi 8. Memahami materi mata pelajaran dengan baik 9. Tidak pantang menyerah saat memiliki nilai yang tidak bagus 10. Fokus belajar untuk menggapai cita-cita 11. Mengikuti ekstrakurikuler yang menunjang cita-cita 12. Keinginan memperoleh penghargaan prestasi di kelas 13. Bertanggung jawab terhadap tugas sekolah 14. Yakin dengan kemampuan yang dimiliki 15. Semangat meningkatkan belajar 16. Mencari les tambahan 17. Menetapkan waktu belajar di rumah menyelesaikan tugas 18. Belajar atas kemauan sendiri 19. Orang tua memberikan nasihat kepada siswa 20. Orang tua selalu menanyakan tentang perkembangan sekolah siswa 21. Mengerjakan tugas bersama teman 22. Teman memberikan dukungan yang positif 23. Teman membantu dalam mengerjakan tugas 24. Orangtua memberikan hadiah saat siswa memiliki hasil belajar yang baik 25. Melakukan presentasi 26. Melakukan tugas praktek suatu pelajaran 27. Proses belajar outdoor 28. Lingkungan kelas yang bersih 29. Lingkungan kelas yang jauh dari kebisingan 30. Tidak ada gangguan saat belajar di rumah 31. Lingkungan rumah yang kondusif |

*Sumber: Studi Literatur, Oktober 2017*

* 1. **Metode Penelitin dan Teknik Pengumpulan Data** 
     1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji atau menggambarkan tentang kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki sesuai dengan fakta yang ada. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterprestasikan guna menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.

* + 1. **Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

Populasi merupakan kumpulan individu dengan kualitas dan ciri-ciri tertentu. Populasi menurut Soehartono (2011: 57) yaitu: “Jumlah keseluruhan unit analisis yaitu objek yang akan diteliti”. Sampel menurut Soehartono (2011: 57) adalah: “Suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya”.

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah siswa/i SMP Negeri 215 Jakarta Barat yang mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan yang tidak mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *stratified random sampling* karena sifat populasi yang memiliki tingkatan kelas. Menurut Soehartono (2011: 61) *stratified* *random sampling* adalah sebagai berikut:

Jika populasi terdiri atas lapisan atau beberapa *stratum* (jamaknya disebut strata) dan agar sampelnya juga mencerminkan lapisan-lapisan pada populasi sehingga representatif, maka cara pengambilan sampelnya dilakukan dari setiap lapisan secara acak. Apabila proporsi sampelnya tidak sama, maka cara pengambilan sampelnya disebut *proportional stratified random sampling.* Apabila proporsi sampelnya tidak sama, maka cara pengambilan sampelnya disebut *nonproportional stratified random sampling.*

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa/i SMP Negeri 215 Jakarta Barat, yang kemudian diambil sampel yaitu siswa/i yang mendapatkan bantuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan yang tidak mendapatkan bantuan. Penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebanyak 217 siswa/i di SMP Negeri 215 Jakarta Barat. 217 siswa/i tersebut akan dibagikan ke dalam dua *stratified (*tingkatan*)*. Hasil penarikan dan perhitungan sampel dapat dilihat dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Populasi dan Sampel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Penerima Bantuan | Populasi | Sampel  (20%) | Jumlah Sampel |
| 1 | Siswa/i Kelas 8 | 120 | 24 | 24 |
| 2 | Siswa/i Kelas 9 | 97 | 19,4 | 20 |
| Jumlah | | 217 |  | 44 |

*Sumber: Studi Literatur, Oktober 2017*

Tabel 1.3 menjelaskan jumlah kelompok eksperimen (KE) diambil sebanyak 20% dari populasi yaitu 44 siswa/i yang telah mendapatkan program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sedangkan kelompok kontrol (KK) yaitu siswa/i yang tidak mendapatkan program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sejumlah 44 siswa/i.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tentang pengaruh program beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap konsep diri siswa dalam mewujudkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 215 Jakarta Barat antara lain sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran, artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung di lapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.
2. Wawawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan pada pengurus sebagai data sekunder.
3. Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan secara tertulis untuk diisi sendiri oleh responden sebagai data primer.
   * 1. **Alat Ukur Penelitian**

Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan skala ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian skala ordinal menurut Suhartono (2008: 76), menyatakan bahwa :

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya dikelompokan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau kasifikasi dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan diketahui lebih tinggi atua lebih rendah tingkatannya daripada golongan yang lain.

Sedangkan teknik pengukuran yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang mempunyai nilai peringkat setiap jawaban artau tanggapan yang digunakan sehingga mendapat nilai total. Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur. Skala likert bisa dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut :

1. Kategori jawaban sangat tinggi diberi nilai 5
2. Kategori jawaban tinggi diberi nilai 4
3. Kategori jawaban cukup atau sedang diberi nilai 3
4. Kategori jawaban rendah diberi nilai 2
5. Kategori jawaban sangat rendah diberi nilai 1
   1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk angka-angka. Untuk data kuantitatif digunakan uji U-MANN WHITNEY. Asumsi-asumsi yang mendasari penggunaan rumus ini adalah :

1. Kedudukan antara populasi independen, yaitu populasi yang akan dibandingkan saling tidak tergantung.
2. Skala data yang digunakan adalah skala likert.

Teknik perhitungan sampel ditentukan sebagai berikut :

U

atau

R2

Keterangan :

u = Simbol statistik yang dipakai dalam U-MANN WHITNEY

n1 = Jumlah responden kelompok I

n2 = Jumlah responden kelompok II

R1 = Jumlah rangking kelompok I

R2 = Jumlah rangking kelompok II

Pengujian statistik ini pada kriteria kelompok, yaitu 2 kelompok saling lepas dan keduanya memiliki skala ordinal, kemudian hasil perhitungan dari rumus U dimasukan ke dalam rumus Z hitung dengan rumus :

zhitung =

Dimana :

N = n1 + n2

T =

T = Banyaknya observasi yang berangka sama untuk semua rangking tertentu. Hasil perhitungan zhitung dibandingkan dengan ztabel dengan kriteria :

H0 = Ditolak, H1 diterima jika zhitung <Ttabel

H0 = Ditolak, H1 ditolak jika zhitung >Ttabel

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
     1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 215 Jakarta Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai berikut :

1. SMP Negeri 215 adalah salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan program beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP)
2. Masalah yang diteliti berkaitan dengan kajian kesejahteraan sosial
3. Lokasi penelitian terkait dengan topik dan masalah yang diteliti penulis sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian
4. Tersedianya data yang diperlukan guna menunjang kelancaran dari penelitian
   * 1. **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah selama enam bulan, terhitung sejak Agustus 2017 sampai Februari 2018, dengan waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap pelaporan

Tabel 1.4 Waktu Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan** | | | | | | |
| **2017-2018** | | | | | | |
| **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** | **Mar** |
| Tahap Persiapan | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penjajakan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyusunan Pedoman Wawancara |  |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Pelaksanaan | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengolahan dan Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Pelaporan | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bimbingan Penulisan |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pengesahan Hasil Penelitian Akhir |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sidang Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |

*Sumber: Studi Literatur, Oktober 2017*